

TRIPLE ROLES PEREMPUAN BALI : ANCAMAN ATAU PROTEKSI? (DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA)

Kadek Fransiska Kharisma Oktarina¹, Yeyen Komalasari²

^{1,2} Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia
Email : 22311601014@undhirabali.ac.id¹

ABSTRAK

Perempuan Bali yang telah menikah memiliki setidaknya tiga peran (triple roles) yaitu peran keluarga, peran ekonomi dan peran adat-keagamaan. Setiap peran yang dimiliki oleh perempuan Bali memiliki kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui sejauh mana triple roles ini memberi dampak pada proteksi ketahanan keluarga. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan didukung berbagai referensi dan pengalaman dalam memaknai peran perempuan Bali pada ketahanan keluarga. Hasil dari artikel ini adalah memberikan pandangan bahwa perempuan Bali merupakan individu yang kuat inilah yang membuat perempuan Bali diberikan banyak tugas dan tanggung jawab dalam setiap peran yang dimiliki karena dianggap selalu mampu untuk menyelesaikannya. Peran keluarga yang menuntut seorang perempuan menjadi istri yang ideal, ibu yang baik serta tugas rumah tangga yang harus diselesaikan. Tuntutan peran ekonomi berupa tugas kantor dan tanggung jawab pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Serta tugas dari peran adat dan keagamaan yang merupakan tanggung jawab perempuan Bali tidak hanya kepada keluarga, melainkan juga kepada masyarakat.

Kata kunci: *Triple Roles*, Perempuan Bali, Ketahanan Keluarga

1. Pendahuluan

Partisipasi perempuan Indonesia dalam dunia kerja memberikan dampak bagi segala sektor yang terkait dengannya. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2015, lebih dari 45.000 perempuan dari usia 15 sampai 60 tahun yang bekerja (BPS, 2022). Salah satu yang diuntungkan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja adalah sektor ekonomi dalam keluarga. Lebih dari itu, perempuan yang bekerja juga membantu pemerataan proses pembangunan dalam sebuah negara. Adanya gerakan-gerakan dan kajian-kajian tentang perempuan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih mengembangkan diri dan berkarya, bahkan di bidang yang awalnya dianggap sebagai dunia para laki-laki.

Kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk dapat terlibat aktif dalam dunia kerja juga merupakan akibat dari adanya reformasi dalam pemerintahan. Demokrasi mengakibatkan bergesernya ideologi mengenai gender yang menempatkan perempuan Indonesia hanya pada lingkup rumah tangga, bergeser menjadi ideologi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Ideologi yang baru menuntut ketersediaan aturan dan jaminan ruang bagi perempuan Indonesia dalam rumah tangga dan publik (Bemmelen & Grijns, 1998).

Dengan adanya aturan dan jaminan ini, kebutuhan perempuan Indonesia akan aktualisasi diri dapat diwujudkan juga melalui dunia kerja, baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta. Suyadnya (2001) menyebutkan beberapa alasan seorang perempuan ikut bekerja dan menghasilkan uang adalah untuk membantu ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kesempatan untuk memulai karir, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, dan keyakinan bahwa

perempuan yang bekerja lebih baik dibandingkan perempuan yang hanya diam di rumah atau ibu rumah tangga.

Pergerakan ideologi dan pandangan mengenai kesetaraan gender menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut juga membawa dampak positif dan negatif bagi perempuan Indonesia dan dampak bagi bidang atau orang-orang yang terkait dengan keberadaan perempuan. Salah satu yang berdampak adalah peran perempuan dalam rumah tangga. Perempuan Indonesia yang sudah menikah tidak hanya berperan menjadi istri dan mengasuh anak serta menjalankan tugasnya di rumah tangga, namun juga memiliki peran sebagai pekerja dan tanggung jawab lain yang harus diselesaikan bagi perusahaan yang mempekerjakannya. Banyaknya peran yang dijalani individu diistilahkan sebagai peran ganda atau multi peran yang kemudian dapat menjadi sebuah konflik antar peran. Konflik peran terjadi ketika tuntutan salah satu peran menyebabkan tuntutan dan ekspektasi peran lainnya menjadi sulit atau tidak dapat tercapai (Ferguson, Carlson, Hunter, & Whitten, 2012).

Perempuan yang sudah menikah memiliki multi peran yang juga rentan menimbulkan konflik peran. Konflik peran perempuan yang sudah menikah seringkali terjadi karena perubahan tanggungjawab peran yang semakin banyak dan tidak dibarengi dengan perubahan dan penyesuaian oleh pasangan atau orang-orang di sekitarnya (Saskara, Pudjihardjo, Ghazali, & Agus, 2012). Semakin banyak peran yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya konflik.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif eksploratif dengan didukung berbagai referensi dan pengalaman dalam memaknai peran perempuan Bali pada ketahanan keluarga. Dari referensi-referensi jurnal yang ada, dengan mempergunakan penelitian-penelitian yang beranekaragam dan sudah dilakukan, sangat membantu untuk menambah informasi dan pengetahuan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan arsip-arsip resmi lain yang masih relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Triple Roles Perempuan Bali

Multi peran seorang perempuan di Indonesia yang sudah menikah disebabkan karena tanggung jawabnya terhadap keluarga, pekerjaan dan lingkungan sosial, Peran-peran ini dikenal sebagai *triple roles* perempuan, yaitu peran dalam keluarga, peran ekonomi dan peran budaya atau adat (Tirtayani, 20017; Komalasari, 2017). Dalam kebudayaan Indonesia, perempuan Bali adalah salah satu contoh yang memiliki *triple roles*.

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia, dimana budaya dan adat istiadat di Bali mewajibkan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan agama sesuai dengan aturan adat yang merupakan kesepakatan bersama antar warga yang disebut dengan *awig-awig* (Sirtha, 2004 dalam Komalasari, 2017). Kebanyakan masyarakat Bali menganut kepercayaan Hindu. Hal ini menyebabkan budaya Bali tidak hanya dibangun berdasarkan struktur sosial tetapi juga filsafat agama Hindu. Maka ketika kita berbicara mengenai *awig-awig* dalam budaya Bali, tidak akan terlepas dari budaya (*culture*) dan Hindu (*religion*).

Awig-awig juga turut mengatur peran perempuan Bali dan tanggung jawab yang ditimbulkan oleh peran tersebut. *Triple roles* yang dimiliki perempuan Bali misalnya

berkaitan erat dengan *awig-awig* terutama yang mengatur tentang peran perempuan dalam lingkungan adat atau sosial. Peran adat dan keagamaan merupakan peran perempuan Bali dalam menjadi anggota sebuah komunitas. Tanggung jawab dan tuntutan dalam bermasyarakat yang diistilahkan *menyama beraya*, pelaksanaan pelestarian budaya serta persiapan perangkat upacara keagamaan seperti banten dibebankan kepada perempuan. Perempuan Bali dalam peran adat keagamaan diberikan tanggung jawab dari awal persiapan pembuatan sarana upacara, pengarahan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pembersihan sarana sembahyang (Komalasari, 2017). Kegiatan tersebut dilakukan perempuan Bali sebagai sebuah tradisi yang diteruskan secara turun-temurun dan diatur dalam *awig-awig*. Hal ini dilakukan juga untuk mempertahankan budaya Bali agar ajeg.

Bali merupakan daerah yang menganut kebudayaan patriarki yang bersumber dari sistem kekerabatan yang berbentuk patrilineal (Widayani & Hartati, 2014). Budaya patriarki dalam kebudayaan Bali juga turut memberi sumbangan dalam menentukan hak dan kewajiban perempuan Bali. Arjani (2006) menyebutkan bahwa budaya patriarki cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan kurang menguntungkan bagi perempuan, karena perempuan cenderung dibebankan tanggung jawab yang lebih khususnya dalam mengurus rumah tangga dan sarana ibadah setiap harinya.

Dalam masyarakat Bali juga dikenal konsep *purusha* dan *predana*. *Purusha* mengacu pada segala hal dan kewajiban yang berkaitan dengan laki-laki dan *predana* mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan perempuan. Konsep ini yang menjadi landasan untuk membedakan tanggung jawab bagi peran laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup adat dan keagamaan (Wiasti, 2006). Pada beberapa tugas tertentu, peran laki-laki dan perempuan tidak dapat saling menggantikan.

Peran perempuan Bali dalam *triple roles* yang kedua adalah peran ekonomi. Peran secara langsung dijalani seorang perempuan Bali dalam bidang ekonomi adaah dengan bekerja membantu menyejahterakan ekonomi keluarganya. Peran tidak langsung yang dijalani perempuan Bali adalah dengan menjadi pelestari budaya Bali sehingga sektor pariwisata yang menjadi mata pencaharian masyarakat Bali tetap berlangsung. Partisipasi perempuan Bali dalam dunia kerja bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi perempuan Indonesia secara keseluruhan berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (SAKERNAS, 2010). Hal ini dapat dipahami melalui ajaran *Catur Purusa Artha* dalam Kitab Bhagawad Gita (1972), yang menekankan bahwa bekerja berdasarkan sifat yang baik (*dharma*) dan keinginan yang baik (*kama*) untuk memperoleh penghasilan (*artha*) guna mencapai kebahagiaan yang abadi (*moksha*). Hal ini juga yang menjadi motivasi perempuan Bali dalam bekerja (Saskara et al., 2012).

Peran ketiga perempuan Bali adalah peran keluarga. Peran keluarga merupakan peran seorang perempuan sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak, bahkan anak bagi orang tua dan mertuanya. Fakih (2005) menyatakan anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara, rajin dan tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga. Hal ini mengakibatkan seorang perempuan akan dibebankan semua pekerjaan domestik. Bahkan tanggung jawab peran berdasarkan gender tersebut sudah disosialisasikan kepada perempuan sejak dini. Sedangkan laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni pekerjaan domestik sehingga menyebabkan beban kerja rumah tangga menjadi tanggung jawab peran perempuan di keluarga.

Triple Roles Perempuan Bali sebagai Faktor Resiko dan Faktor Protektif bagi Ketahanan Keluarga

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perempuan Bali yang telah menikah memiliki setidaknya tiga peran (*triple roles*) yaitu peran keluarga, peran

ekonomi dan peran adat-keagamaan. Setiap peran yang dimiliki oleh perempuan Bali memiliki kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan.

Kebudayaan dalam masyarakat Bali, yang diwarnai dengan filsafat dan pandangan Hindu, memandang seorang perempuan sebagai sosok seorang dewi yang merupakan representasi dari sumber pengetahuan, kemakmuran dan bakti (Bhagawad Gita, 1972). Sifat Tuhan dilambangkan sebagai karakter yang feminisme melalui perwujudan Dewi Durga (dilambangkan dalam pengasuhan), Laksmi (dewi kemakmuran) dan Saraswati (dewi pengetahuan). Peran ketiga Dewi tersebut yang harus dimaknai dalam kehidupan perempuan Bali dan dijalani dalam *triple roles* tersebut (Takwin, 2001). Pandangan bahwa perempuan Bali serupa Dewi atau Tuhan juga yang menyebabkan perempuan Bali dianggap sebagai individu yang kuat dan selalu mampu menyelesaikan setiap tugas rumah tangga yang diberikan setiap harinya (Suyadnya, 2009).

Pandangan bahwa perempuan Bali merupakan individu yang kuat inilah yang membuat perempuan Bali diberikan banyak tugas dan tanggung jawab dalam setiap peran yang dimiliki karena dianggap selalu mampu untuk menyelesaikannya. Peran keluarga yang menuntut seorang perempuan menjadi istri yang ideal, ibu yang baik serta tugas rumah tangga yang harus diselesaikan. Tuntutan peran ekonomi berupa tugas kantor dan tanggung jawab pekerjaan yang juga harus diselesaikan. Serta tugas dari peran adat dan keagamaan yang merupakan tanggung jawab perempuan Bali tidak hanya kepada keluarga, melainkan juga kepada masyarakat.

Interaksi antar peran pada diri seorang perempuan Bali sangat rentan menimbulkan konflik apabila tuntutan dan ekspektasi pada sebuah peran mengganggu dan menyebabkan tuntutan dan ekspektasi dari peran lainnya tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap peran dapat menjadi sumber konflik dan semakin banyak peran yang dimiliki akan semakin menimbulkan resiko terjadinya konflik yang lebih tinggi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam dekade ini mengenai konflik peran, utamanya konflik yang terjadi antara peran keluarga dan peran ekonomi atau pekerjaan. Penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya konflik peran keluarga dan pekerjaan juga sudah dilakukan dengan *literature review* sehingga diperoleh gambaran perbandingan lintas negara dan antar kebudayaan.

Penelitian konflik peran pekerjaan dan keluarga gambaran mengenai nilai-nilai kebudayaan yang berhubungan dengan terjadinya konflik peran. Budaya kolektif memandang pekerjaan sebagai bagian dari upaya dalam menyejahterakan keluarga, serta memandang hubungan antara pekerjaan dan keluarga sebagai sesuatu yang saling melengkapi bukannya malah bertentangan (Billing, Bhagat, Babakus, Srivastava, Shin & Brew, 2014; Hassan, Dollard & Winefield, 2010). Keberadaan keluarga juga dipandang sebagai pendukung sehingga memungkinkan untuk membantu meredakan konflik peran keluarga dan pekerjaan pada budaya kolektif (Anderson, Coffey, Liu & Zhao, 2008; Billing et al., 2014).

Nilai-nilai budaya kolektif maupun individualis sama-sama memiliki resiko mengalami konflik peran. Masyarakat dalam budaya individualis lebih berorientasi pada pencapaian atau prestasi dan kompetisi yang menyebabkan mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan dapat meningkatkan resiko terjadinya konflik peran (Billing et al., 2014, Aycan, 2008). Keluarga dalam budaya kolektif selain sebagai pendukung juga memiliki tuntutan yang tinggi yang harus dipenuhi. Tuntutan dan tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya datang dari keluarga inti, tetapi juga dari keluarga besar. Hal ini juga dapat menyebabkan meningkatnya resiko terjadi konflik peran (Oishi, Chan, Wang & Kim, 2015).

Seorang perempuan Bali dituntut untuk menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada anggota keluarga, seperti halnya sifat-sifat yang diharapkan dari setiap perempuan. Kepedulian juga harus ditunjukkan dengan menjalankan peran ekonominya yaitu bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Keluarga sebagai pusat identitas seorang perempuan Bali yang kebudayaannya bersifat kolektif atau dalam Bahasa Bali disebut *menyama braya*, menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Konflik perempuan Bali yang bersumber dari peran keluarga terhadap peran ekonomi dapat dihindari dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari anggota keluarga lainnya.

Konflik lain yang mungkin terjadi adalah konflik peran yang bersumber dari ekonomi terhadap peran keluarga. Artinya, konflik terjadi karena tuntutan dari pekerjaan yang menyebabkan tugas dalam peran keluarga menjadi terabaikan atau tidak optimal. Salah satu faktor yang berpotensi menjadi sumber konflik di lingkungan kerja adalah sistem *reward*. Henry (2006) menyatakan bahwa sistem *rewards* dapat memengaruhi kinerja seseorang karena *rewards* yang lebih tinggi akan diberikan kepada pekerja yang berprestasi lebih banyak sehingga pekerja akan bekerja lebih keras dan waktu yang di habiskan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan akan lebih banyak. Situasi demikian dapat menimbulkan resiko lebih tinggi terhadap terjadinya konflik peran. Perempuan Bali yang bekerja dan mengejar *rewards* yang lebih tinggi akan memiliki potensi yang lebih tinggi juga untuk mengalami konflik peran ekonomi dan keluarga.

Dampak negatif yang dapat dirasakan perempuan dengan adanya konflik peran di dunia pekerjaan adalah persentase pekerja perempuan yang mengalami *burnout* yang merupakan kelelahan fisik, mental dan emosional yang dialami karena stres yang berkepanjangan (Schultz & Schultz, 1994), ketidakbebasan dalam melaksanakan tugas pekerjaan, serta pertumbuhan karir yang terhambat (Kulik & Faisal, 2006).

Perempuan Bali, utamanya yang bekerja di sektor pariwisata yang bergerak dalam bidang jasa hotel dan restoran, melihat pariwisata Bali yang berkembang pesat sebagai peluang usaha. Aktivitas perempuan Bali dalam bidang ekonomi tidak selalu memberikan dampak negatif dan dapat menimbulkan konflik serta mengancam keutuhan keluarga. Pekerjaan bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan peran keluarga (Suyadnya, 2009). Bali yang merupakan juga memandang bekerja sebagai bagian dari usaha menyejahterakan keluarga sehingga tuntutan pekerjaan tidak dipandang sebagai ancaman yang dapat menimbulkan konflik yang merusak keluarga (Aycan, 2008). Meski begitu, untuk menjaga keluarga tetap bertahan kuat dengan semua fungsinya, perempuan Bali yang bekerja harus mendapatkan persetujuan dan izin dari suami dan keluarga karena dukungan keluarga dapat membantu menghindarkan terjadinya konflik (Suyadnya, 2009; Jin, Ford & Chen, 2013).

Sumber konflik ketiga perempuan Bali merupakan yang berasal dari peran adat dan keagamaan. Tugas dan tanggung jawab perempuan Bali dalam bermasyarakat dan berbakti kepada Tuhan dapat menjadi sumber permasalahan terhadap tugas dan tanggung jawab peran lainnya. Perempuan Bali yang telah menikah mempunyai kewajiban dalam identitasnya di masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi adat atau yang disebut sebagai desa adat. Dalam desa adat juga dilakukan pengaturan ritual keagamaan, karena tanggung jawab keagamaan tidak hanya berlaku di rumah tangga tetapi juga tanggung jawab kepada rumah ibadah atau pura Kahyangan Tiga milik desa (*ngayah*). Perempuan Bali yang sudah menikah, dalam peran keagamaan diberikan tugas seperti memberikan sesaji atau banten (*mebanten*), berpartisipasi dan memberikan bantuan pada setiap hari raya maupun pada saat terjadinya peristiwa suka dan duka yang dialami anggota masyarakat lainnya (*ngupin*) (Rivai, 1981).

Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan perempuan Bali dalam perannya di desa adat maupun di pura, maka dapat dikatakan bahwa penyebab konflik utama adalah waktu. Intensitas kegiatan adat dalam budaya Bali seperti yang telah disebutkan di atas dinyatakan DeMeulenaere & Lietaer (2003) sebagai sumber konflik bagi tugas dalam peran lainnya. Kegiatan adat dan keagamaan diatur dalam *awig-awig* yang merupakan pengikat semua anggota masyarakat adat tanpa memandang status sosial. Salah satu hal yang diatur dalam *awig-awig* ialah mengenai sanksi yang didapatkan apabila seseorang tidak melaksanakan tugas adatnya. Sanksi terberat bukanlah berbentuk uang, namun pengasingan, yaitu mengasingkan seseorang yang menolak tiga kali secara berturut-turut untuk mematuhi keputusan masyarakat. Dalam budaya Bali, meninggalkan dan mengacuhkan komunitas adat hanya dapat dilakukan bila ingin berbaring dan mati saja. Selama kehidupannya, maka sebisa mungkin harus menjalankan peran dengan baik dan menjadi prioritas (Saskara et al., 2012).

Pada prinsipnya kegiatan adat dan keagamaan pada budaya Bali berlandaskan gotong royong. Artinya, setiap anggota masyarakat terbangun rasa kebersamaan, saling menolong dan saling berempati. Peran adat dan keagamaan seorang perempuan Bali selain sebagai sumber konflik, harus juga dapat dilihat sebagai upaya yang baik dalam rangka peran perempuan Bali dalam menjaga kelestarian budaya menghadapi globalisasi. Upaya yang baik yang dapat dilakukan perempuan Bali dalam meredam konflik dan mempertahankan keutuhan keluarga adalah kembali menjaga keharmonisan melalui konsep tri hita karena. Tri hita karena merupakan konsep yang memprioritaskan kepada harmoni dan keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan.

4. Simpulan

Perempuan Bali yang sudah menikah memiliki tiga peran yang disebut sebagai triple roles yaitu peran keluarga, peran ekonomi dan peran adat. Tugas dan tanggung jawab masing-masing peran yang menuntut untuk dipenuhi membuat ketiga peran tersebut rentan terhadap konflik yang dapat berdampak pada konsekuensi-konsekuensi negatif misalnya mengalami burnout dan ketakutan untuk sukses (fear of success), maupun yang mengancam ketahanan keluarga.

Selain berpotensi memberikan dampak negative, triple roles perempuan Bali juga memberi dampak positif yaitu memberikan kesempatan pada perempuan untuk turut menjadi pelestari budaya, sarana aktualisasi diri dengan cara berkarir, kesempatan yang lebih luas dalam upaya menyejahterakan keluarga dibidang ekonomi dan meningkatkan ikatan antar anggota keluarga dengan saling mendukung. Dalam budaya kolektif, dukungan keluarga dan pandangan mengenai masing-masing peran perempuan yang dinilai sebagai kewajiban dan bakti yang harus dilakukan, merupakan faktor yang sangat penting untuk menekan terjadinya konflik antar peran. Selain itu, budaya Bali menekankan juga pada harmonisasi dan keseimbangan hubungan antar peran melalui konsep tri hita karena.

5. Daftar Rujukan

- Anderson, S., Coffey, B., Liu, Y., & Zhao, S. (2008). Employees in Chinese enterprises: Antecedents and outcomes of work-family balance. *The Chinese Economy*, 41: 22–50.
- Arjani, N. L. (2006). Peran gender dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. *Kembang Rampai Perempuan Bali*, 1-22.

- Aycan, Z. (2008). Cross-cultural perspectives to work-family conflict. In K. Korabik, & D. Lero (Eds.), *Handbook of work-family conflict* (pp. 359–371). London: Cambridge University Press.
- BPS. 2022. BPS. Available from : (<https://www.bps.go.id>)
- Bemmelen, S. Van, & Grijns, M. (1998). Competing Gender Identities after Reformasi? A Case-study from Bali as Inspiration for New Research in, 85–100.
- Bhagawad, G. 1972. *The Bhaktivedanta Book Trust International*. Inc.
- Billing, T. K., Bhagat, R., Babakus, E., Srivastava, B., Shin, M., & Brew, F. (2014). Work-family conflict in four national contexts: A closer look at the role of individualism-collectivism. *International Journal of Cross Cultural Management*, 14: 139–159.
- DeMeulenaere, S. & Lietaer, B. 2003. Sustaining cultural vitality in a globalizing world: The Balinese example. *International Journal of Social Economics*. (30)9:
- Fakih, M. 2005. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ferguson, M., Carlson, D., Hunter, E. M., & Whitten, D. 2012. A two-study examination of work-family conflict, production deviance and gender. *Journal of Vocational Behavior*, 81(2): 245–258.
- Hassan, Z., Dollard, M. F., & Winefield, A. H. 2010. Work-family conflict in East vs Western countries. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 17: 30–49.
- Henry, S. 2006. *Manajemen sumber daya manusia* (3rd ed). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Jin, J. F., Ford, M. T., & Chen, C. C. 2013. Asymmetric differences in work-family spillover in North America and China: Results from two heterogeneous samples. *Journal of Business Ethics*, 113: 1–14.
- Komalasari, Y. 2017. *Nilai tambah wanita karier Bali sebagai sosok pelestari budaya: Proceeding of Seminar Nasional AIMI, 27-28 Oktober 2017*. Jambi, pp 199-206.
- Kulik, L., dan Faisal, R. 2006. *Relationship between dual earner spouse, strategies for coping with home-work demand and emotional wellbeing*. *Community, Work, and Family*. (9)4: 457–477.
- Oishi, A. S., Chan, R. K. H., Wang, L. L.-R., & Kim, J.-H. 2015. Do part-time jobs mitigate workers' work-family conflict and enhance wellbeing? New evidence from four East-Asian societies. *Social Indicators Research*, 121: 5–25.
- Rivai, A. 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- SAKERNAS. 2010. Survei Angkatan Kerja Nasional. Available From <https://sirusa.bps.go.id>.
- Saskara, I. A. N., Pudjihardjo, Ghazali, M., & Agus, S. 2012. Tinjauan perspektif ekonomi dan nonekonomi perempuan Bali yang bekerja di sektor publik: studi konflik peran. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10 (3). 542-552.
- Schultz, D.P., Schultz, S.E. 1994. *Psychology and work today: An Introduction to industrial and organizational psychology*. (6th Ed.). New York: MacMillan Publishing Company.
- Suyadnya, I. W. 2009. Balinese Women and Identities: Are They Trapped in Traditions, Globalization or Both? *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22(2): 95–104.
- Takwin, B. 2001. Aspek feminim dalam spiritualitas Hindu: Potret Ilahi setengah hati. *Jurnal perempuan: Untuk pencerahan dan kesetaraan*, 20: 69-83.
- Tirtayani, L. A. 2007. *Wanita Bali dalam pemaknaan peran: Studi fenomenologis terhadap triple roles wanita Bali di Desa Adat Kuta* (tesis). Perpustakaan Universitas Diponegoro.
- Wiasti, N. M. 2006. Hubungan industrial yang berwawasan gender: Studi kasus pada industri kerajinan bamboo di Desa Belega, Kabupaten Gianyar, Bali. *Kembang Rampi Perempuan Bali*, 134-153.
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. 2014. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam

Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2): 149–162.